

RELASI KREATIVITAS FASHION DAN KEKUASAAN

Penampilan Fashion Presiden dari Masa ke Masa

Triyanto

triyanto.ma@gmail.com

Prodi Teknik Busana PTBB FT UNY

ABSTRAK

Eksistensi pakaian sebagai salah satu icon kekuasaan menjadi suatu keniscayaan. Melalui pakaian telah mampu menjadi symbol ataupun penanda kekuasaan. Fungsi pakaian tidak hanya melindungi tubuh dari pengaruh eksternal lingkungan. Namun demikian pakaian menjadi relasi penting dalam mencapai tujuan politik kekuasaan. Pada Forum Seminar Nasional yang terhormat ini akan penulis "ulik" mengenai relasi antara pakaian dan kekuasaan terutama menggunakan pakaian Presiden Indonesia dari masa ke masa dalam memberikan identitas kekuasaannya. Untuk membedah relasi tersebut penulis menggunakan pendekatan multidisipliner ilmu seperti seni, politik, dan sejarah yang dikemas secara mikro. Melalui pendekatan multidisipliner tersebut dapat terekam secara jelas bagaimana perwujudan eksistensi budaya pakaian Presiden Indonesia dari masa ke masa dalam membalut politik yang dijalankannya.

Kata Kunci: Kreativitas Fashion dan Kekuasaan

PENDAHULUAN

Dari tujuh presiden yang pernah memimpin Indonesia, masing-masing memiliki ciri khas dalam berbusana. Perbedaan dalam menampilkan cara berbusana itu tentu saja bukan merupakan sesuatu tanpa perhitungan, namun demikian keberadaan pakaian sebagai penampilan Presiden Indonesia mempunyai dasar yang sangat kuat terhadap realitas gejala sosial ataupun situasi politik yang melingkupi. Diantara pakaian yang dikenakan Presiden Indonesia masing-masing memiliki suasana sosial politik yang berbeda-beda, seperti pemakaian pakaian Presiden Soekarno pada waktu Indonesia sedang menghadapi perjuangan menuju kemerdekaan yang secara politik kekuasaan lebih dikenal sebagai Era Orde Lama (ORLA).

Pemakaian pakaian Presiden Soeharto pada waktu menghadapi masa pembangunan Indonesia yang secara politik disebut sebagai Era Orde Baru (ORBA), dan pemakaian busana setelah keruntuhan Era ORBA adalah pakaian yang dikenakan

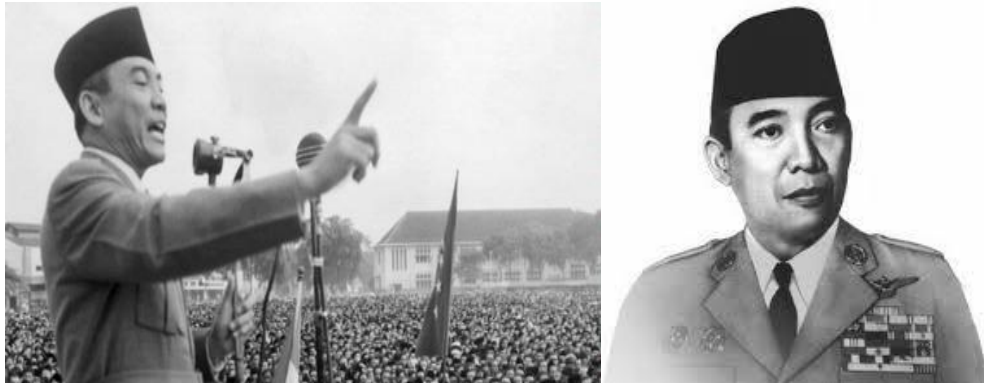
oleh Presiden Gusdur, SBY, dan Jokowi yang lebih dikenal secara politik sebagai Era Reformasi. Kedudukan pakaian yang awalnya hanya merupakan selembar kain pembungkus tubuh manusia dari sengatan hewan ataupun perlindungan diri dari pengaruh eksternal lingkungan akhirnya dianggap sangat penting dan memerlukan perhatian terhadap perlakuan penggunaannya. Perlakuan pemakaian busana sebagai aktualisasi kekuasaan itu bukan saja baru lahir, namun demikian telah menjadi perhatian sejak negara ini masih berupa kerajaan-kerajaan.

Menurut Henk Schulte Nordholt, pada tingkat yang kurang lebih sadar, kebiasaan berpakaian sudah menjadi alat, membentuk dan mereproduksi berbagai kelompok orang-orang dalam arti bahwa batas-batas antara kelompok-kelompok tersebut menjadi sangat jelas dan oleh karena itu sukar dilangkahi. Baik negara maupun kelompok kepentingan menggunakan kode-kode berpakaian untuk menciptakan penampilan kuat dari kontrol negara, kebangsaan atau solidaritas kelompok: Artinya bahwa fashion (mode) dapat menjadi alat politik penguasa untuk membentuk segregasi sosial pada masyarakat. Pada masyarakat kerajaan di Indonesia pakaian raja, bangsawan dan rakyat biasa selalu dibedakan baik kualitas, desain maupun waktu penggunaannya. Hal ini sebagai pembeda dari status sosial mereka, dan ini berlanjut hingga kolonisasi yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa di Indonesia (<http://jawarakampung.blogspot.com>). Maka untuk memudahkan penulisan dalam membedah relasi kreativitas berpakaian presiden terhadap kekuasaan dibagi menjadi tiga era, yakni pemakaian pakaian presiden pada Era Orde lama, pemakaian pakaian Presiden pada Era Ode Baru, dan pemakaian pakaian Presiden pada Era Ode Reformasi.

Fashion dan Kekuasaan Era Orde Lama

Secara birokrasi kelembagaan pemerintahan formal nasional negara, kekuasaan pertama Indonesia dimulai oleh Presiden Soekarno. Era pemerintahan Soekarno merupakan awal penegakan kemerdekaan dari penjajahan yang telah lama bercokol di bumi Nusantara. Situasi politik saat itu adalah didominasi semangat kesatuan untuk berperang melawan Belanda dan kroninya. Nuansa nilai semangat kepahlawanan sangat tampak. Semangat nilai kepahlawanan itu juga dapat terbaca dari cara penyampaian busana yang dikenakan Presiden Soekarno. Seperti yang dinyatakan perancang dan pengamat mode gaya hidup Sonny Muchlison "Presiden Soekarno biasa memakai setelan jas dengan tanda kepangkatan dan simbol

militer. mempunyai penilaian tersendiri terkait gaya busana. Sebagai presiden pertama di masa perjuangan, Presiden Sukarno dituntut tidak hanya pandai berpidato. Seorang orator tentu tidak dapat 'menyihir' ribuan masa, jika tidak memiliki elegansi dan wibawa" (Detikcom, Kamis 16/10/2014). Penggunaan pakaian seperti itu menunjukkan bahwa Presiden Soekarno ingin menunjukkan sebagai pemimpin yang kuat penuh semangat kepahlawanan.



<https://id.pinterest.commy.opera.com>

Fashion dan Kekuasaan Era Orde Baru (ORBA)

Presiden Soeharto merupakan presiden ke-2 Indonesia setelah keruntuhan Tahta Soekarno akibat imbas gonjang-ganjing pembontakan G-30 S PKI. Era perjuangan terhadap kemerdekaan telah diupayakan Soekarno. Era berikutnya adalah era pengisian pembangunan. Pembangunan Indonesia menandai Presiden Soeharto dijuluki sebagai 'Bapak Pembangunan'. Untuk mengamankan era pembangunan Soeharto menggunakan pendekatan militerian. Hampir semua pejabat birokrasi berasal dari militer. Melalui pejabat militer di bawahnya, Soeharto dapat mengambil tongkat kendali kekuasaan. Suasana politik menjadi kurang dinamis, terasa kaku. Ekspresi berkarya masyarakat terkungkung dalam balutan mata-mata yang setiap waktu dapat di 'ciduk' masuk jeraji besi (Triyanto 2008). Soeharto yang di besarkan melalui dunia kemiliteran penuh disiplin tergambarkan pula terhadap cara pilihan berbusana. Budaya tentara yang memelihara kesatuan, keseragaman, dan ketertiban menjadikan busana safari pilihan fashion yang sering dikenakan Presiden Soeharto ketika bekerja kedinasan mengunjungi lokasi peresmian pembangunan di berbagai desa Indonesia. Pilihan fashion Soeharto secara tidak langsung menjadi penanda kekuasaan era pembangunan. Gaya pakaian safari diikuti oleh jajaran berbagai staf yang ada di bawahnya, seperti pakaian yang dikenakan oleh para menteri, gubernur, bupati, camat, dan PNS pada umumnya.



<http://www.gentaandalas.com><http://nasional.harianterbit.com>

Fashion dan Kekuasaan PascaReformasi

Pemerintahan Soeharto yang korup memanggil semangat mahasiswa se-Indonesia untuk menumbangkan kekuasaan Soeharto yang telah lama mencengkram demokrasi yang lebih luwes. Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 1998 diduduki ribuan mahasiswa. Mahasiswa menuntut Soeharto untuk 'lengser' dari kekuasaannya. Suasana kegaduhan awal reformasi terekam di seluruh wilayah Indonesia. Luapan emosi pergantian kekuasaan itu juga terlihat dari banyaknya demo masyarakat ke jalan dengan membakar ban, menumbangkan pohon, taman kota, bahkan di beberapa tempat terjadi penjarahan. Menyadari realitas itu Presiden Soeharto dengan penuh legowo mengundurkan diri dari kekuasaan. Lengsernya Soeharto dari kekuasaan menjadikan rakyat penuh hiruk pikuk pesta pora 'euforia reformasi'. Euforia reformasi menjadikan kran-kran demokrasi berkarya yang kemarin 'mampet' menjadi terbuka dengan bebas. Pilihan desain produk fashion juga kian bervariasi, mulai dari kebaya modifikasi, baju batik, sampai paduan penggunaan celana panjang denim muncul di berbagai tempat. Relasi kekuasaan dan kreativitas fashion Pasca Reformasi terlihat pada presiden yang dilahirkan, seperti Presiden Abdul Rahman Wahid, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo. Pilihan berbusana menjadi lebih bebas, bahkan Era Presiden Abdul Rahman Wahid (Gus Dur) mencabut terhadap tata tertib berbusana aparatur negara. Gus Dur sebagai pemangku kekuasaan era reformasi dilahirkan dalam situasi politik yang sedang mengalami euforia. Kebebasan mengungkapkan budaya karya terekam pula pada pakaian yang menjadi pilihan Gus Dur. Gus Dur yang dibesarkan dipesantren hidup dalam pilihan kesederhanaan fashion. Kesederhanaan tersebut terlihat di dalam busana batik putih motif kawung besar lengan pendek sehingga mampu memunculkan nama 'kemeja batik Gus Dur'. Ekspresi Gus Dur juga sering dimunculkan lewat menggunakan peci miring, ataupun sarung, bahkan celana pendek. Bagi sebagian orang penampilan pakaian Gus Dur ini sebut sebagai penampilan

'nyleneh' tidak memperhatikan patron. Bahkan ketika beliau keluar dari istana negara karena *impeachment* yang dilakukan oleh MPR, maka beliau hanya memakai celana pendek. Peristiwa ini tentu saja dianggap sebagai sebuah ironi bagi orang yang memandang jabatan dan segalanya sebagai sesuatu yang sakral. Adakah dasar filosofis dan moralitas yang ingin disampaikan oleh Gus Dur di dalam berbagai peristiwa yang terkait dengan dirinya. Dengan selalu menggunakan batik, seakan Gus Dur ingin menyatakan bahwa "ini adalah pakaian khas Indonesia". Batik mengandung rasa nasionalisme. Makanya, Gus Dur seperti ingin menyampaikan bahwa "pakaian batik melambangkan nasionalisme Keindonesiaan". Itulah sebabnya, ketika batik memperoleh hak paten dari badan dunia, maka serta merta batik menjadi trade mark Indonesia di dunia internasional. Serta merta banyak pejabat dan aparat yang memakai batik. Apalagi Presiden SBY juga dalam banyak acara resmi menggunakan batik lengan panjang. Batik terangkat pamornya sebagai lambang ke Indonesiaan.



<https://manjanik.wordpress.com>

Era pemerintahan Gusdur yang penuh dengan euphoria reformasi menjadikan pada Pilpres berikutnya merindukan kehadiran sosok berwibawa. Pada tahun 2004 Indonesia pertama kali melakukan pemilihan presiden langsung yang dipilih oleh rakyat. Soesilo Bambang Yudhoyono atau yang lebih dikenal SBY menjadi pemangku kekuasaan menggantikan Gusdur. Latar belakang SBY yang militerian juga dapat terlihat dari pilihan fashion. Seragam safari yang pernah jaya di jaman Soeharto menjadi pilihan fashion yang sering dikenakan. Namun demikian pada situasi tertentu kemunculan batik lengan panjang juga sering mewarnai aktivitas SBY di forum-forum formal kenegaraan. Dengan kemeja safari SBY tampak lebih rapi, kuat, dan berwibawa.



<http://www.bisnishotel.com>

Kekuasaan SBY dapat berlangsung hingga dua periode. Periode berikutnya dilanjutkan oleh pemerintahan Jokowi. Yang menarik sebelum Jokowi memenangkan pilpres adalah pemakaian fashion yang cukup menonjol dalam memperoleh opini masyarakat pemilih. Pertarungan itu diawali dengan penggunaan masing-masing calon presiden. Baju kotak-kotak menjadi identitas Jokowi yang berkesan muda, gaul, santai, dan merakyat. Setelah menang, untuk memberikan kesan pemerintahan yang bersih terhadap kabinetnya Jokowi mewajibkan menteri-menterinya pada waktu pelantikan mengenakan kemeja putih, lengan panjang namun digulung, dan baju tidak dimasukkan. Pemandangan ini terlihat lucu dan terkesan "main-main". Bahkan ketika Jokowi memanggil satu persatu menteri-menterinya, ia menyuruh mereka untuk cepat "lari pak, lari" katanya saat memanggil menteri-menterinya. Penampilan Presiden dan menteri-menteri yang akan menjadi kabinet kerja seperti menghilangkan "wibawa" sang menteri. Gaya berpakaian seperti ini memang adalah ciri khas Jokowi ketika menjadi Walikota dan Gubernur. Penampilan tidak formal para menteri ini sekilas menunjukkan cara berpakaian yang tidak rapi, apalagi beberapa diantaranya adalah para akademisi seperti rektor yang terbiasa berpakaian rapi. Kemeja putih ini sengaja dipilih karena menunjukkan kesederhanaan dan kesucian. Sejak Jokowi memperkenalkan seragam baju putih lengan panjang digulung bercelana gelap beserta para menteri-menterinya pada saat pelantikan bulan Oktober lalu, seragam tersebut seperti menjadi trade mark baru PNS. Dalam beberapa rapat maupun penelusuran ke beberapa kementerian, tampak para PNS sudah mulai menggunakan seragam atasan putih dan bawahan berwarna gelap. Bahkan instansi yang memiliki seragam tersendiri berubah menjadi putih gelap, walaupun dipakai pada hari-hari tertentu saja. Memang belum ada peraturan umum yang mewajibkan para PNS menggunakan seragam putih gelap tersebut. Namun demikian beberapa kementerian telah mengeluarkan surat

edaran yang mewajibkan penggunaan seragam putih gelap bagi para PNS maupun honorer di lingkungannya. Alasannya adalah demi peningkatan disiplin kerja pegawai dalam hal berpakaian. Selain itu tentunya warna putih dianggap menjadi simbol suci dan bersih dari KKN dalam bekerja sehingga diharapkan para PNS bekerja secara profesional sesuai dengan bidangnya.<http://www.kompasiana.com>



<http://www.kompasiana.com>

Pemerintahan Jokowi-JK akan segera menerbitkan Peraturan Presiden mengenai pakaian dinas Aparatur Sipil Negara (ASN), yang sempat dibatalkan di era pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, Perpres yang akan diterbitkan tersebut menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1980 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil. "Pakaian dinas diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas ASN secara profesional. Selain itu, pakaian dinas juga diperlukan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan, jiwa korsa di antara sesama ASN, memelihara semangat gotong royong dalam melaksanakan tugas, menumbuhkan rasa aman, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik," ujar Menteri Yuddy melalui keterangan tertulis yang diterima, Rabu (17/2/2016). Selama menjabat sebagai Menteri PANRB, Yuddy mengaku kerap menemukan pakaian dinas ASN yang berbeda-beda saat berkunjung ke daerah. Menurut dia, ada ASN yang setiap hari memakai pakaian daerah, ada yang menggunakan atribut khas masing masing instansi, hingga menggunakan atribut seperti militer. "Hal itu jelas tidak tepat. Walaupun menggunakan atribut kepangkatan, semestinya dibuat yang sederhana," ujar dia. Deputi Kelembagaan dan Tatalaksana Kementerian PANRB Rini Widyantini mengatakan, pakaian dinas ASN harus memenuhi beberapa kriteria, selain sederhana, pakaian dinas juga harus nyaman dipakai, dengan desain model yang serasi, sopan, dan humanis. "Pakaian dinas juga harus mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas dan fungsi, memperhatikan gender, mengutamakan produksi dalam negeri, serta mendorong penguatan identitas nasional dan penguatan budaya bangsa," kata Rini. Rini menjelaskan, pakaian dinas ASN yang diatur Perpres, akan terdiri dari tiga jenis yakni pakaian dinas harian (PDH), pakaian resmi, dan pakaian upacara bendera. Untuk pakaian dinas harian terdiri dari dua macam pakaian antara lain pakaian kerja umum dan pakaian kerja khusus. "Untuk pakaian kerja umum, terdiri dari pakaian kerja nasional, pakaian kerja instansional, dan pakaian kerja tradisional. Pakaian kerja umum ini dikenakan oleh ASN yang tidak memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat," jelas dia. Sedangkan pakaian kerja khusus, dikenakan oleh ASN yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan/atau melaksanakan fungsi ketertiban dan/atau penegakan hukum. "Pakaian kerja khusus misalnya pakaian Satpol PP, atau petugas imigrasi," kata Rini. Sementara itu pakaian dinas resmi merupakan pakaian yang dikenakan oleh ASN pada acara/upacara resmi kenegaraan dalam dan luar negeri. Sedangkan pakaian upacara bendera, dikenakan oleh ASN pada upacara bendera peringatan hari besar nasional. Rini juga mengatakan bahwa Kementerian PANRB berencana menghidupkan kembali penyelenggaraan upacara pengibaran bendera merah putih di lingkungan instansi pemerintah pada tanggal 17 setiap bulan. Hal ini dinilai perlu untuk meningkatkan rasa nasionalisme, pengabdian, tanggung jawab, disiplin, dan pelaksanaan gerakan revolusi mental aparatur sipil negara guna mewujudkan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang dilandasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Untuk merealisasikannya, pemerintah akan mencabut Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden nomor 14 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih. <http://www.teropongsenayan.com>.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan kreativitas dalam membentuk pengaruh kekuasaan mempunyai relasi yang sangat kuat. Eksistensi pilihan fashion menjadi penanda situasi harapan pesan yang ingin disampaikan oleh pemangku kekuasaan. Pilihan menggunakan fashion menjadi citra sosok penguasa apakah berkesan tegas militerian atau sebaliknya berkesan santai merakyat. Maka melalui tulisan ini dapat diperoleh gambaran yang jelas terhadap langkah ke depan dalam membentuk opini di Antara relasi fashion dan kekuasaan baik di lingkungan Negara pada umumnya, maupun kampus pada khususnya.

REFERENSI

Henk Schulte Nordholt (<http://jawarakampung.blogspot.com>)

Sonny Muchlison (Detikcom, Kamis 16/10/2014)

Triyanto (2008). *Bentuk Kebaya dari Masa ke Masa*. Yogyakarta:
Tesis Pascasarjana UGM

<http://www.teropongsenayan.com/31137-pemerintah-aktifkan-perpres-yang-dibatalkan-di-era-gus-dur-apa-itu>

http://www.kompasiana.com/dizzman/wajah-baru-seragam-pns-era-jokowi_54fd1ca9a333112b3550f859

[http://nursyam.uinsby.ac.id/GUS DUR DAN NASIONALISME SELEMBAR BATIK](http://nursyam.uinsby.ac.id/GUS_DUR_DAN_NASIONALISME_SELEMBAR_BATIK)

<http://www.gentaandalas.com/reformasi-tidak-untuk-dikenang>

<http://news.detik.com/berita/2721859/menilik-gaya-busana-presiden-dari-masa-sukarno-hingga-sby>

<https://id.pinterest.com/pin/438397344956563855/>